

# PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) dan PENYAJIANNYA DALAM LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN KONTRAKTOR PT. DEWANATA PERKASA MOJOKERTO PERIODE 2017

Oleh :  
**Abdul Mukhid Murtadho**

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  
Universitas Islam Majapahit Mojokerto  
Email : abdulmukhidmurtadho@gmail.com

## ABSTRACT

Tax is one of the original sources of domestic income in addition to fees, donations and investments. All business entities, both private and state-owned, have an important role in state revenue, especially in the field of taxation. A tax object subject to Value Added Tax (VAT) in accordance with the Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2000 is a service carried out by a contractor / contractor / sub contractor.

This study aims to find out how to calculate and treat accounting for Value Added Tax (VAT) in the presentation of financial statements in PT. Mighty Mighty. The research method used in this study is to identify Input Tax and Output Tax, then evaluate the accounting treatment of Value Added Tax in the presentation of financial statements namely Balance Sheet and Profit and Loss.

From the results of the study it is known that PT. Dewanata Perkasa has not applied Value Added Tax Accounting based on Financial Accounting Standards, this can be seen from the absence of journals in accordance with the Financial Accounting Standards in each company's financial transactions related to Value Added Tax.

**Keywords:** *Accounting treatment, value added tax, presentation of financial statements*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan asli dalam negeri selain retribusi, sumbangan dan investasi. Semua badan usaha baik swasta maupun milik Negara mempunyai peranan penting di dalam penerimaan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak dari transaksi jual beli barang dan jasa.

PT. Dewanata Perkasa merupakan perusahaan kontraktor yang berbentuk badan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi atau jasa pemborong bangunan yang diharuskan melakukan kewajiban perpajakan, dimana salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Pada akhir suatu periode akuntansi, setiap manajemen akan menyampaikan pertanggung jawaban keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, baik kepada pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal yang berkepentingan terhadap penyajian laporan keuangan, khususnya dalam hal ini kantor Direktorat Keuangan Jenderal Pajak. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk komunikasi antar perusahaan dengan para pemakai laporan keuangan ini dapat diketahui tentang keadaan suatu perusahaan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut dalam mengambil keputusan. Dimana neraca dan laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul penelitian : **“Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penyajiannya dalam Laporan Keuangan pada Perusahaan Kontraktor PT. Dewanata Perkasa”**.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Secara umum pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dapat dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dikreditkan, Suandy (2003:59).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu : “pertambahan nilai adalah harga beli atau biaya sewa yang harus dikeluarkan untuk mengelola lebih lanjut barang yang dibeli menjadi barang yang siap untuk jual” Urifa (2009:9).

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai akuntansi PPN, terlebih dahulu penulis uraikan pengertian akuntansi, menurut Baridwan, (2013:1) : “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Akuntansi PPN dapat diartikan sebagai akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pembukuan dan bertujuan memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN yang terutang.

Di dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBM, PSAK tahun 2009 hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan. Untuk itu laporan keuangan yang disusun haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan keuangan harus dapat menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan harus dapat memenuhi kebutuhan bersama (sebagian besar pemakai).
3. Laporan keuangan harus dapat menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban mengenai sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan catatan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang masing-masing.

Permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan adalah menentukan waktu pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Pengakuan pendapatan seperti yang terdapat di SAK (PSAK 23) paragraf 19, 20, 21, 25, 27, 2009).

Pada dasarnya akuntansi di perusahaan konstruksi tidak berbeda dengan akuntansi pada jenis perusahaan lain pada umumnya. Namun, salah satu masalah khusus pada perusahaan konstruksi yang mungkin tidak terdapat pada jenis perusahaan lainnya adalah yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Kebanyakan, pendapatan diakui pada saat penjualan (penyerahan) barang/jasa terjadi, karena hal-hal yang tidak pasti berkaitan dengan proses perolehan pendapatan tersebut, relatif tidak ada dan harganya pun telah diketahui. Namun dalam situasi tertentu, mungkin saja pendapatan diakui sebelum penyelesaian atau penyerahan terjadi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan kuantitatif. Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data tentang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian mengidentifikasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, lalu mengevaluasi perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dalam penyajian laporan keuangan yaitu Neraca dan Laba Rugi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Dewanata Perkasa merupakan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yaitu perusahaan kontraktor bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Berdasarkan sertifikat dari lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) PT. Dewanata Perkasa bergerak dalam bidang Arsitektur dan Sipil, sedangkan sub bidangnya meliputi :

- a) Mekanikal dan elektrikal
- b) Bangunan, perumahan dan pemukiman
- c) Pengurukan, jalan, bendungan dan renovasi.

Dalam membukukan semua transaksi ekonomisnya, PT. Dewanata Perkasa menggunakan tahun kalender (1 Januari – 31 Desember), maka besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus diperhitungkan juga berdasarkan tahun kalender. Sehubungan dengan usaha yang dilakukan jasa konstruksi, maka PT. Dewanata Perkasa berkewajiban menghitung dan menyetorkan PPN-nya ke kas negara.

### a. Pajak Pertambahan Nilai Masukan

Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dapat dikreditkan adalah PPN yang dibayarkan atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP), dimana BKP tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan proyek atau berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan. Pada tahun 2017 PT. Dewanata Perkasa melakukan transaksi pembelian bahan-bahan material sebagai berikut :

**Tabel Daftar Proyek PT. Dewanata Perkasa Tahun 2017**

No	Nama Proyek	Jangka Waktu	Harga Kontrak
1.	Proyek Bronjong	7 Mei 2017 s/d 27 Juli 2017	Rp. 987.063.000,00
2.	Proyek Pembangunan Ruko Japanan Trede Center	28 Juli 2017 s/d 28 Desember 2017	Rp. 1.721.500.000,00

Sumber data : PT. Dewanata Perkasa

**Tabel PPN Masukan Menurut Perkiraan Harga Material Tahun 2017**

No.	Nama Proyek	Harga Material	PPN Masukan	Jumlah yang dibayar ke suplyer
1.	Proyek Bronjong	Rp. 384.570.000,00	Rp. 38.457.000,00	Rp. 423.027.000,00
2.	Proyek Pembangunan Ruko Japanan Tread Kulture	Rp. 1.025.000.000,00	Rp. 102.500.000,00	Rp. 1.127.500.000,00
Jumlah		Rp. 1.409.570.000,00	Rp. 140.957.000,00	Rp. 1.550.527.000,00

Sumber : Data diolah

Keterangan : PPN Masukan = 10% x Harga material

. Berdasarkan tabel Pembelian Bahan Material Tahun 2017, dalam pencatatan PPN Masukan PT. Dewanata Perkasa mencatatnya sebagai berikut: contoh pembelian bahan material pada Proyek Bronjong :

Persediaan Bahan Material Rp. 384.570.000,00

Beban Usaha Rp. 38.457.000,00

Kas

Rp. 423.027.000,00

(Jurnal diatas merupakan pencatatan pembelian bahan material jika pembelian dibayar tunai).

Kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengakui PPN Masukan sebagai beban usaha.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 UU PPN menghitung PPN yang terutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. PPN Masukan yang di catat pada jurnal pembelian bahan material perusahaan yang diakui sebagai beban usaha itu salah, karena menurut pasal 13 UU PPN, suplier wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. PPN masukan tersebut dikenakan atas setiap pembelian bahan persediaan sebesar 10 % dari harga jual, baik secara tunai maupun secara kredit.

b. Pajak Pertambahan Nilai Keluaran

**Tabel Daftar Pemotongan PPN Keluaran atas Proyek yang dilaksanakan oleh PT. Dewanata Perkasa Tahun 2017**

No.	Nama Proyek	Harga Kontrak Bersih	PPN Keluaran
1.	Proyek Bronjong	Rp. 897.330.000,00	Rp. 89.733.000,00
2.	Proyek Pembangunan Ruko Japanan Trede Center	Rp. 1.565.000.000,00	Rp. 156.500.000,00
Jumlah		Rp. 2.462.330.000,00	Rp. 246.233.000,00

Sumber data : PT. Dewanata Perkasa

Keterangan : PPN Keluaran = 10% x Harga Kontrak

Perlakuan akuntansi atas pajak keluaran yang dilakukan oleh PT. Dewanata Perkasa berdasarkan tabel 4.5 Daftar Pemotongan PPN Keluaran sudah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan perhitungan PPN Keluaran = 10% x harga kontrak. Dimana perusahaan mengakui pendapatan proyek bersih dari harga kontrak dikurangi dengan PPN Keluaran. Karena perusahaan merupakan perusahaan dengan multi bidang usaha dan sementara menjalankan usaha di bidang bangunan atau properti, maka Pajak Keluaran dikenakan atas penyerahan barang kena pajak. Perusahaan tidak melakukan penjumlahan atas penerimaan uang muka proyek karena perusahaan tidak menerima uang muka.

Adapun jurnal yang dibuat jika perusahaan menerima uang muka proyek:

Kas	xxx		
	Uang Muka Proyek		xxx
	PPN Keluaran		xxx
PPN Keluaran	xxx		
Kas		xxx	

**Tabel Total Daftar Pembayaran PPN**

No.	Nama Proyek	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN yang seharusnya dibayar
1.	Proyek Bronjong	Rp 89.733.000,00	Rp. 38.457.000,00	Rp. 128.190.000,00
2.	Proyek Pembangunan Ruko Japanan Trede Center	Rp. 156.500.000,00	Rp. 102.500.000,00	Rp. 259.000.000,00

		Rp.246.233.000,00	Rp. 140.957.000,00	Rp. 387.190.000,00
--	--	-------------------	--------------------	--------------------

Sumber : Data diolah

Keterangan : PPN yang dibayar = PPN Keluaran + PPN Masukan

Dewanata Perkasa berdasarkan tabel Daftar Pemotongan PPN Keluaran sudah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan perhitungan PPN Keluaran = 10% x harga kontrak. Dimana perusahaan mengakui pendapatan proyek bersih dari harga kontrak dikurangi dengan PPN Keluaran. Karena perusahaan merupakan perusahaan dengan multi bidang usaha dan sementara menjalankan usaha di bidang bangunan atau properti, maka Pajak Keluaran dikenakan atas penyerahan barang kena pajak. Perusahaan tidak melakukan penjumlahan atas penerimaan uang muka proyek karena perusahaan tidak menerima uang muka.

Adapun jurnal yang dibuat jika perusahaan menerima uang muka proyek:

Kas	xxx		
	Uang Muka Proyek		xxx
	PPN Keluaran		xxx
PPN Keluaran	xxx		
	Kas	xxx	

### Mengukur Kemajuan Suatu Kontrak atau Tahap Penyelesaian Suatu Kontrak Dengan Metode Presentase Penyelesaian

#### a. Pengakuan pendapatan untuk proyek tahun 2017

##### 1. Proyek Bronjong

Harga Kontrak	Rp 987.063.000,00	
PPN Keluaran	( Rp. 89.733.000,00)	
Harga Kontrak bersih	Rp. 897.330.000,00	
Biaya yang terjadi dalam Proyek :		
Biaya Material + ppn	Rp. 423.027.000,00	
Biaya Tenaga Kerja	Rp. 154.380.000,00	
Biaya Umum Proyek	<u>Rp. 55.800.000,00</u>	
Estimasi total biaya penyelesaian		<u>(Rp. 633.207.000,00)</u>
Laba kotor yang diharapkan		Rp. 264.123.000,00
Total laba bersih pendapatan setelah evaluasi hasil perusahaan untuk proyek Bronjong tahun 2017 adalah :		
	= Rp. 264.123.000,00 – pph (1,5% dari harga kontrak bersih)	
	= Rp. 264.123.000,00 – Rp.13.459.950,00	
	= Rp. 250.663.050,00	
Jadi presentase laba bersih pada proyek bronjong adalah sbb :		
	$\frac{\text{Laba bersih setelah pph} \times 100}{\text{harga kontak}}$	
	(Rp. 250.663.050,00 x 100) : Rp 987.063.000,00 = 25,39 %	

##### 2. Proyek Pembangunan Ruko Japanan Trede Center

Harga Kontrak	Rp.1.721.500.000,00	
PPN Keluaran	<u>(Rp. 156.500.000,00)</u>	
Harga Kontrak bersih		Rp. 1.565.000.000,00
Biaya yang terjadi dalam Proyek		
Biaya Material +ppn	Rp. 1.127.500.000,00	
Biaya Tenaga Kerja	Rp. 300.000.000,00	
Biaya Umum Proyek	<u>Rp. 25.822.500,00</u>	

Estimasi total biaya penyelesaian (Rp.1.453.322.500,00)  
 Laba kotor yang diharapkan Rp. 111.677.500,00  
 Total laba bersih pendapatan setelah evaluasi hasil perusahaan untuk proyek  
 Pembangunan Ruko Japanan Trede Center adalah :  
 = Rp. 111.677.500,00 – pph (1,5% dari harga kontrak bersih)  
 = Rp. 111.677.500,00 – Rp. 23.475.000,00  
 = Rp. 88.202.500,00  
 Jadi presentase laba bersih pada proyek Pembangunan Ruko Japanan Trede  
 Center adalah sbb :

$$\frac{\text{laba bersih setelah pph} \times 100}{\text{harga kontrak}}$$

(Rp. 88.202.500,00 x 100) : Rp 1.721.500.000,00 = 5,12 %

Berdasarkan rincian nilai kedua proyek di atas maka dapat disimpulkan bahwa jika pengakuan estimasi total biaya kontrak tahap penyelesaian kontrak proyek tahun 2017 adalah 100% dan pengakuan pendapatan dari total nilai kontrak bersih tahun 2017 juga 100%, maka kemajuan presentase kontrak terhadap kedua proyek tersebut terbilang sukses.

**Laporan Laba Rugi PT. DEWANATA PERKASA**  
**Periode 31 Desember 2017**

Pendapatan :	
Harga Kontrak	Rp. 2.708.563.000,00
PPN Keluaran	<u>Rp. 246.233.000,00</u>
Pendapatan Proyek	Rp. 2.462.330.000,00
Biaya Proyek HPP :	
Material + pph	Rp. 1.550.527.000,00
Upah Tenaga Kerja	Rp. 454.380.000,00
Biaya Umum Proyek	<u>Rp. 81.622.500,00</u>
Total Biaya Proyek	<u>Rp. 2.086.529.500,00</u>
Laba Kotor	Rp. 375.800.500,00
Biaya Administrasi umum	
Gaji karyawan	Rp. 96.000.000,00
Administrasi kantor	Rp. 14.000.000,00
Biaya Telepon	Rp. 6.000.000,00
Penyusutan aktiva Tetap	<u>Rp. 18.750.000,00</u>
Total Administrasi umum	<u>Rp. 134.750.000,00</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp. 241.050.500,00
pph (1,5% dari harga kontrak bersih)	
Proyek bronjong	Rp. 13.459.950,00
Proyek JTC	<u>Rp. 23.475.000,00</u>
Total pph perusahaan	<u>Rp. 36.934.950,00</u>
Laba bersih setelah pajak	Rp. 204.115.550,00

Sumber data : PT. Dewanata Perkasa

Berdasarkan data yang penulis analisis pada tabel 4.1 Proyek Bronjong dan tabel 4.2 Proyek Pembangunan Ruko Japanan Tread Kulture, sumber data dari

perusahaan serta kajian pustaka yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, bahwa perusahaan sudah melakukan perhitungan kemajuan suatu kontrak dengan menggunakan metode presentase penyelesaian yang sesuai dengan PSAK No. 34 yaitu biaya hasil (outcome) kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak.

## PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dicatat perusahaan

### a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan

**Tabel Masukan Menurut Perkiraan Harga Material Tahun 2017**

No.	Nama Proyek	Harga Material	PPN Masukan	Jumlah yang dibayar ke suplyer
1.	Proyek Bronjong	Rp. 384.570.000,00	Rp. 38.457.000,00	Rp. 423.027.000,00
2.	Proyek Pembangunan Ruko Japanan Tread Kulture	Rp. 1.025.000.000,00	Rp. 102.500.000,00	Rp. 1.127.500.000,00
Jumlah		Rp. 1.409.570.000,00	Rp. 140.957.000,00	Rp. 1.550.527.000,00

Sumber : Data diolah

Adapun jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada saat melakukan pembelian bahan-bahan material bangunan kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut :

Bangunan dalam perencanaan Rp. 1.409.570.000,00  
 Beban usaha Rp. 140.957.000,00  
 Kas Rp. 1.550.527.000,00  
 (Jurnal di atas merupakan pencatatan pembelian bahan persediaan dibayar tunai (kas/Bank).

### b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran

**Tabel Daftar Pemotongan PPN Keluaran**

No	Nama Proyek	Harga Kontrak Bersih	PPN Keluaran	Harga Kontrak
1.	Proyek Bronjong	Rp. 897.330.000,00	Rp. 89.733.000,00	Rp. 987.063.000,00
2.	Proyek Pembangunan Ruko Japanan Trede Center	Rp. 1.565.000.000,00	Rp. 156.500.000,00	Rp. 1.721.500.000,00
Jumlah		Rp. 2.462.330.000,00	Rp. 246.233.000,00	Rp. 2.708.563.000,00

Sumber data : PT. Dewanata Perkasa

Menurut perlakuan akuntansi PPN keluaran pada tabel diatas dapat di simpulkan bahwa PPN tidak dapat dimasukkan sebagai beban usaha tetapi harus dicantumkan dalam laporan keuangan, yaitu dalam neraca.

Jika harga kontrak yang di dapat perusahaan seperti table diatas yang mana harga kontrak bersih di tambah dengan PPN, maka perlakuan akuntansi perusahaan terhadap PPN keluaran perusahaan dapat dibenarkan.

## Mengukur kemajuan kontrak

Deskripsi perusahaan yang tertulis pada laporan akuntansi setelah seluruh protek terselesaikan :

**Laporan Laba Rugi PT. DEWANATA PERKASA**  
**Periode 31 Desember 2017**

Pendapatan :	
Harga Kontrak	Rp. 2.708.563.000,00
PPN Keluaran	<u>Rp. 246.233.000,00</u>
Pendapatan Proyek	Rp. 2.462.330.000,00
Biaya Proyek HPP :	
Material + pph	Rp. 1.550.527.000,00
Upah Tenaga Kerja	Rp. 454.380.000,00
Biaya Umum Proyek	<u>Rp. 81.622.500,00</u>
Total Biaya Proyek	<u>Rp. 2.086.529.500,00</u>
Laba Kotor	Rp. 375.800.500,00
Biaya Administrasi umum	
Gaji karyawan	Rp. 96.000.000,00
Administrasi kantor	Rp. 14.000.000,00
Biaya Telepon	Rp. 6.000.000,00
Penyusutan aktiva Tetap	<u>Rp. 18.750.000,00</u>
Total Administrasi umum	<u>Rp. 134.750.000,00</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp. 241.050.500,00
pph (1,5% dari harga kontrak bersih)	
Proyek bronjong	Rp. 13.459.950,00
Proyek JTC	<u>Rp. 23.475.000,00</u>
Total pph perusahaan	<u>Rp. 36.934.950,00</u>
Laba bersih setelah pajak	Rp. 204.115.550,00

Sumber data : PT. Dewanata Perkasa

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengakuan pendapatan PT. Dewanata Perkasa menggunakan metode presentase penyelesaian fisik yang telah dikerjakan.
2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa PT. Dewanata Perkasa belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
3. Penyajian Pajak Pertambahan Nilai dalam laporan keuangan perusahaan. Pada laporan keuangan PT. Dewanata Perkasa, seharusnya perusahaan menyajikan Hutang PPN pada Neraca karena pada akhir tahun perusahaan mengalami kurang bayar.

Sehubungan dengan masih adanya kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada PT. Dewanata Perkasa dalam akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, maka penulis akan memberikan saran-saran yang nantinya akan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh manajemen perusahaan dalam rangka meningkatkan sebagai berikut :

1. Sebagai penunjang dalam proses pencatatan PPN, hendaknya perusahaan PT. Dewanata Perkasa menyelenggarakan buku tambahan proyek yang membuat informasi tentang PPN Keluaran dan PPN Masukan masing-masing proyek. Hal ini untuk mempermudah dan mempercepat penyediaan informasi tentang penerimaan-penerimaan termin dan kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi terlebih dahulu.
2. Sebaiknya perusahaan menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dengan membuat jurnal untuk setiap transaksi pembelian Barang Kena Pajak maupun transaksi penjualan Barang Kena Pajak, dengan diterapkannya Akuntansi Pajak

Pertambahan Nilai berfungsi bagi perusahaan, sebagai analisis untuk menentukan perkiraan yang di debit dan perkiraan yang di kredit serta jumlahnya masing-masing, dan untuk mencatat aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

### DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. (2013). Edisi 8. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Akbar, Muhammad. (2013). *Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada.Fikri Utama Pontianak*. Web site: <http://akbarlife.blogspot.com/2013/11/jurnal-akuntansi.html>
- Sugiyono Prof. Dr. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif dan R & D*. Bandung : CV. Alfa Beta.
- Waluyo.( 2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Agustinus, Sonny., Kurniawan, Isnianto. 2011. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Gustian, Djuanda & Lubis, Irwansyah. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas*
- Barang Mewah. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kuncoro, Mudjarad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. edisi revisi 2009. Penerbit Andi offset.Yogyakarta.
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 *Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Mardiasmo. (2002). edisi revisi 2002. *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sukarji, Untung. (2000). *Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- [http://www.unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Jurnal%20Ekomaks/Jurnal%20Ekomaks%202013/Maret/10\\_Darmoko\\_Hal%20132-148.pdf](http://www.unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Jurnal%20Ekomaks/Jurnal%20Ekomaks%202013/Maret/10_Darmoko_Hal%20132-148.pdf) (diunduh pada 19/04/2018)
- [http://www.crayonpedia.org/mw/BAB\\_2.\\_AKUNTANSI\\_UNTUK\\_PERUSAHAAN\\_KONSTRUKSI\(diunduh\\_pada\\_19/04/2018\)](http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_2._AKUNTANSI_UNTUK_PERUSAHAAN_KONSTRUKSI(diunduh_pada_19/04/2018))
- Ibnu Hadjar. 1996. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Burhan Bungin. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Yusuf Muri. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta . PT Fajar Interpratama Irata.
- Suharsimi Arikunto. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.